

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KOMISI IRIGASI (SIKOMIR) DALAM KELEMBAGAAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jefri Fernando¹, Triyuni Soemartono², Abdul Samad³

Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta
E-mail Korespondensi: jefrifernando@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze policy implementation, obstacles and efforts made to optimize the Irrigation Commission Information System (SIKOMIR) policy in institutions in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. The aim of this research is to analyze policy implementation, obstacles and efforts made to optimize the Irrigation Commission Information System (SIKOMIR) policy in institutions in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province. This research was carried out using a qualitative, descriptive approach with a design approach. Postpositivism is a modification of the positivism approach. The informants in this research were 5 people from the Central Lombok Regency Public Works - Water Resources Service, Central Lombok Regency Agriculture Service, Central Lombok Regency Irrigation Commission and members of Farmer Groups and related parties. From the research results, conclusions were drawn, namely: (1) The implementation of the Irrigation Commission Information System (SIKOMIR) policy in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, is in accordance with the SIKOMIR guidelines issued by the Directorate General of Regional Development of the Ministry of Home Affairs, although obstacles are still found. in terms of facilities and infrastructure as well as existing human resources. (2) Obstacles in implementing the Irrigation Commission Information System (SIKOMIR) policy in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, include the low quality of human resources and limited infrastructure to support the policy. (3) Efforts that need to be made to optimize the implementation of the Irrigation Commission Information System (SIKOMIR) policy in Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province, include meeting the needs for policy supporting infrastructure, providing training for farmers participating in the SIKOMIR program and expanding the involvement of other parties. related parties in implementing SIKOMIR policies.

Keywords: Policy Implementation, Irrigation Commission Information System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan, hambatan, dan upaya yang dilakukan guna mengoptimalkan kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan rancangan pendekatan postpositivisme yaitu modifikasi dari pendekatan positivisme. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum - Sumber Daya Air Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah, Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah dan Anggota Kelompok Tani dan pihak-pihak terkait. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan, yaitu: (1) Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada. (2) Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem

Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. (3) Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi Komisi Irigasi

PENDAHULUAN

Ketersediaan sumber daya air dan lahan pertanian potensial semakin langka dan terbatas. Dalam kondisi sumber daya air terbatas, sementara kebutuhan air untuk berbagai kepentingan terus meningkat, menyebabkan permintaan terhadap air semakin kompetitif. Ketersediaan sumber daya air yang semakin terbatas dan kompetitif tidak hanya akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi dapat memicu konflik baik antar sektor ekonomi maupun antar pengguna dalam suatu sektor.

Walaupun salah satu maksud pengelolaan daerah pengairan untuk mendistribusikan air secara adil dan merata, namun dalam mekanismenya kerap kali dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar, antara lain jumlah daerah golongan air bertambah, tanpa kontrol; letak petakan sawah relatif dari saluran tidak diperhitungkan dalam distribusi air, dan dalam anjuran teknologi yang berada di bagian hilir (tail end); penyadapan air secara liar dengan pompa berlanjut tanpa sanksi; pintu-pintu air banyak yang tidak berfungsi; dan produktivitas padi sangat beragam antara bagian hulu dan hilir. Hal ini tidak terlepas dari unsur

kelembagaan dan perangkat kebijakan yang belum berfungsi secara efektif dalam upaya menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengelolaan air. Adanya pandangan bahwa air irigasi adalah barang publik (public goods) menyebabkan masyarakat cenderung kurang efisien dalam menggunakan air. Secara ekonomi, ketidakjelasan tentang hak-hak (water rights) dan kewajiban dalam pemanfaatan air, menyebabkan organisasi asosiasi pemakai air kurang efektif. Disamping itu, mekanisme kelembagaan dalam alokasi sumber daya air tidak berfungsi, yang pada gilirannya akan menimbulkan inefisiensi penggunaan air serta adanya potensi konflik dalam pengalokasian air.

Dalam upaya mencapai pengelolaan sumber daya air yang efisien dan berdimensi pemberdayaan petani diperlukan penyesuaian kelembagaan, baik untuk kelembagaan pemerintah, swasta maupun petani. Pada tingkat petani dipandang penting untuk mengembangkan organisasi petani pemakai air yang responsif dan mampu menyesuaikan kegiatannya terhadap perubahan unsur-unsur kelembagaan dalam era otonomi daerah. Tingkat kebutuhan air di luar

sektor pertanian yang paling dominan adalah untuk memenuhi konsumsi rumah tangga dan industri yang cenderung meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kemajuan ekonomi. Keterbatasan air tidak hanya akan berdampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi pemicu konflik antar sektor ekonomi. Kendati ketersediaan air dapat dipenuhi dengan jalan memanfaatkan sumber daya air, seperti air permukaan dan air tanah, namun kenyataannya di sebagian wilayah yang berdekatan dengan kota-kota besar di Jawa dan di luar Jawa, kerap kali air belum mencukupi kebutuhan.

Semakin kompleksnya permasalahan yang menyangkut pengalokasian sumber daya air untuk berbagai kepentingan menuntut adanya langkah-langkah antisipatif strategis melalui pengembangan sistem informasi manajemen pemakaian air yang integratif antar wilayah. Belum terwujudnya kerjasama yang baik antara petani pemakai air dan organisasi pengelola air di tingkat mikro dengan organisasi pengelola air di tingkat makro, akan mempersulit terciptanya sistem pengelolaan air irigasi secara utuh dan berkelanjutan. Belum adanya penerapan sanksi secara konsisten sesuai dengan yang telah disepakati terhadap anggota yang melanggar telah berdampak pada menurunnya kinerja dan kepercayaan anggota kepada kinerja pengelola air dan secara tidak langsung mempengaruhi

petani lainnya untuk melakukan pelanggaran. Fenomena tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan air secara mandiri dan profesional, melalui model kelembagaan pengelolaan air irigasi yang sejalan dengan otonomi daerah.

Dalam pengelolaan irigasi di suatu wilayah sangatlah banyak pihak-pihak yang berkepentingan baik pemerintah, pengelola jaringan irigasi dan petani pemanfaat jaringan irigasi. Mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam pemanfaatan jaringan irigasi, maka seyogyanya irigasi menjadi satu kesatuan sistem yang dikelola secara partisipatif untuk menjaga keberlangsungan jaringan irigasi tersebut (Kurniasih, 2018). Pengelolaan irigasi yang melibatkan banyak unsur, diantaranya Pemerintah Daerah, Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A), kelompok tani (Poktan/Gapoktan), dan pengguna jaringan irigasi lainnya haruslah dikoordinasikan kegiatannya dengan baik. Untuk mendorong terwujudnya koordinasi kegiatan, maka dibutuhkan kelembagaan Komisi Irigasi. Secara prinsip Komisi Irigasi sebagai lembaga koordinasi dan komunikasi dalam implementasi kebijakan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP). Komisi Irigasi sebagai kelembagaan non struktural memiliki keberfungsian sebagai forum koordinasi antara pemerintah dan masyarakat petani pemanfaatan air untuk irigasi dan lainnya (Djito, 2016). Keberadaan Komisi Irigasi memiliki nilai yang strategis dalam perencanaan dan

pengelolaan daerah irigasi yang lebih efektif dan efisien, mengingat kelembagaan komisi irigasi memberikan rekomendasi perencanaan irigasi yang menentukan rencana tanam bagi petani, terutama pada komoditas padi (Aristanto, 2020b). Disamping itu, keberadaan komisi irigasi juga merekomendasi berbagai pemikiran yang mendorong perbaikan kebijakan-kebijakan di bidang irigasi yang tentunya akan berdampak langsung pada pertanian. Komisi Irigasi merupakan bagian dari proses untuk pemberdayaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi. Sebagai koordinator dari berbagai unsur, kapasitas dari Komisi Irigasi sendiri perlu diperkuat dan dijaga keberlanjutannya. Salah satunya dengan cara pemantauan dan evaluasi kinerjanya. Pemantauan dan penilaian kinerja perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana tugas pokok dan fungsinya berjalan sesuai ketentuan agar tetap berada dalam koridor menuju capaian akhir program.

Dasar hukum pelaksanaan Komisi Irigasi secara tersirat dan tersurat diatur dalam beberapa regulasi seperti undang-undang maupun peraturan pemerintah dan peraturan menteri, berkaitan dengan pengelolaan sistem irigasi bagi petani, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Komisi Irigasi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penguatan kelembagaan Komisi Irigasi yang didukung berbagai undang-undang dan peraturan tersebut merupakan wujud dari upaya pemerintah dalam melakukan modernisasi sistem irigasi yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pengelolaan irigasi partisipatif yang berorientasi pada pemenuhan tingkat layanan irigasi secara efektif, efisien dan berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air melalui peningkatan keandalan penyediaan air prasarana, pengelolaan irigasi, institusi pengelola dan sumber daya manusia.

Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten yang menjadi

peserta dalam Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program (IPDMIP). Program ini merupakan program yang mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi, yang salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Irigasi. Namun dalam pelaksanaan program pengelolaan irigasi di Kabupaten Lombok Tengah, masih ditemui beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya: masih kurang lengkapnya sarana dan prasarana irigasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah; masih rendahnya sumber daya manusia dalam pengelolaan irigasi; kurang mencukupinya ketersediaan air bagi pemenuhan sarana irigasi; kurang optimalnya kelembagaan Petani/P3A/GHIPPA di Kabupaten Lombok Tengah; dan kurang optimalnya pengelolaan air bagi sarana irigasi di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir dalam Prastowo (2011:186), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Menurut Sukmadinata (2011:60), penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Penggunaan desain penelitian deskriptif kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) dalam kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam pada informan pendukung akan dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian dan menjamin kualitas informasi yang diperoleh, peneliti menggunakan beberapa alat bantu yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif seperti tape recoder, kamera, panduan wawancara mendalam, buku catatan lapangan, dan alat tulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu dari sekian banyak kabupaten yang menjadi peserta dalam Program Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program (IPDMIP). Program ini merupakan program yang mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi, yang salah satunya adalah dengan membentuk Komisi Irigasi. Namun dalam pelaksanaan program pengelolaan irigasi di Kabupaten

Lombok Tengah, masih ditemui beberapa hambatan yang terjadi, diantaranya: masih ditemukan kerusakan sarana dan prasarana irigasi di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, masih kurangnya sumber daya pengelola irigasi, ketersediaan air bagi pemenuhan sarana irigasi kurang mencukupi, kelembagaan Petani/P3A/GHIPPA di Kabupaten Lombok Tengah masih kurang optimal, serta pengelolaan air bagi sarana irigasi kurang optimal.

Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) Dalam Kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menunjukkan temuan bahwa pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan rapat teknis yang dilakukan oleh Komisi Irigasi dengan agenda Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT), Rencana Tata Tanam (RTT) dan evaluasi kinerja dari Komisi Irigasi Kabupaten Lombok Tengah setiap tahunnya.

Selanjutnya secara khusus belum ada dasar hukum kebijakan SIKOMIR di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menjadi acuan adalah instruksi dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui Integrated Participatory Development Management of Irrigation Program (IPDMIP). Sementara itu implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di

Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada.

Adapun hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas. Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Niken Mareta Rindasari, Julelah dan Neneng Masitoh (2020), dimana dalam penelitiannya menemukan hasil penilaian kinerja Komisi Irigasi Kabupaten Pandeglang mendapatkan nilai skor 70 dengan kategori berkinerja cukup. Penilaian tersebut menjelaskan dalam pengelolaan kelembagaan komisi irigasi terdapat beberapa kendala yang perlu untuk di

tingkatkan meliputi ketersediaan tenaga ahli dan narasumber dalam berbagai pelaksanaan kegiatan komisi irigasi, masih rendahnya dukungan pendanaan untuk kegiatan operasional komisi irigasi, dan sekretariat komisi irigasi yang masih bersifat sementara (sewa).

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) Dalam Kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dapat dilihat dari temuan-temuan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sudah sesuai dengan panduan SIKOMIR yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri, walaupun masih ditemukan kendala-kendala dari segi sarana dan prasarana serta SDM yang ada.
2. Hambatan dalam implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung kebijakan yang masih terbatas.
3. Upaya yang perlu dilakukan guna mengoptimalkan implementasi kebijakan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara lain memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendukung kebijakan, memberikan pelatihan bagi para petani yang mengikuti program SIKOMIR dan memperluas keterlibatan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan SIKOMIR.

Dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan penerapan Sistem Informasi Komisi Irigasi (SIKOMIR) Dalam Kelembagaan di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka perlu ditempuh strategi sebagai berikut:

1. Mendorong peran aktif Komisi Irigasi dalam mengangkat permasalahan yang muncul di P3A/GP3A terkait pengelolaan irigasi, pertanian untuk ditindaklanjuti ke forum yang lebih tinggi seperti Musrenbang Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
2. Memberikan pertimbangan alih fungsi lahan dengan mensinergikan implementasi Peraturan Daerah tentang irigasi, Peraturan Daerah tentang RT/RW dan Peraturan Daerah tentang PLP2B (Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dalam

mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan.

3. Adanya dukungan dari provinsi dan pemerintah pusat, baik dalam bentuk pelatihan-pelatihan bagi peningkatan kompetensi petugas lapangan, penyediaan sarana prasarana yang memadai, maupun kenaikan alokasi anggaran program kerja yang berguna bagi keberlanjutan kebijakan yang sedang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. (2010). Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. (2017). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, E.Y. (2017). Pengantar Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ardana, Cenik dan Hendro Lukman. (2016). Sistem Informasi Akutansi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Arikunto, Suharsimi. (2016). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aristanto, Eko. (2020). Pemetaan Aspek Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan Sebagai Daya Dukung Pelaksanaan Rehabilitasi Daerah Irigasi di Ciliman Provinsi Banten. LPPM Universitas Merdeka Malang.
- Creswell, John W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Hutahaean, Jeperson. (2015). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Keban, Yaremis T. (2012). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Gava Media.
- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Lukman, Ahmad dan Munawir. (2018). Sistem Informasi Manajemen: Buku Referensi. Banda Aceh: Lembaga KITA.
- Mahatmyo, Atyanto. (2014). Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, Lexy J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Rindasari, dkk. (2020). Evaluasi Tata Kelola dan Kinerja Kelembagaan Komisi Irigasi (KOMIR) Kabupaten Pandeglang. Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH. Volume 7, Nomor 3.
- Sutabri, Tata. (2012). Analisis Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi.
- Tyoso, Jaluanto Sunu Punjul. (2016). Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik: Teori & Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.